

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Kualitas lingkungan yang baik merupakan salah satu modal dasar penting bagi terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Kualitas lingkungan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat lokal, penduduk yang bekerja serta yang berkunjung ke daerah tersebut. Banyak aktivitas manusia yang memiliki dampak buruk terhadap kualitas lingkungan karena pengelolaan sampah dan limbah yang kurang baik, kepedulian masyarakat yang rendah terhadap kebersihan lingkungan, penggunaan yang semakin meningkat bahan-bahan yang tidak mampu didegradasi oleh alam serta bahan xenobiotik lain yang berdampak serius terhadap kualitas lingkungan. Peningkatan jumlah dan penggunaan kendaraan pribadi dan kendaraan yang tidak laik jalan serta operasi industri yang berpengelolaan buruk merupakan penyebab penting lain menurunnya kualitas lingkungan. Perencanaan tata ruang dan wilayah yang tidak mempedulikan kaidah pelestarian lingkungan, kelemahan birokrasi, penegakan hukum dan kelembagaan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kualitas lingkungan.

Salah satu pertimbangan utama didalam penyusunan Status Lingkungan Hidup Provinsi Banten adalah menggunakan dan atau mengacu pada Status Lingkungan Hidup Nasional, digabungkan dengan kebutuhan/kepentingan regional (pada tingkat provinsi), serta mendukung penyusunan Status Lingkungan Hidup kabupaten/kota. Status Lingkungan Hidup Daerah disusun agar dapat menjadi bahan masukan bagi proses pengambilan keputusan pembangunan daerah. Pentingnya Status Lingkungan Hidup Daerah tersebut karena merupakan bagian dari akuntabilitas publik, sarana pendidikan dan pengawasan bagi publik serta sarana keterlibatan publik dalam ikut serta berperan menentukan kebijakan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di daerah.

Banten merupakan provinsi baru yang terbentuk berdasarkan undang-undang No. 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Provinsi Banten terdiri dari 4 Kabupaten (Tangerang, Serang, Pandeglang dan Lebak) serta 2 kota (Tangerang dan Cilegon).

Wilayah Provinsi Banten yang memiliki bentang alam mulai dari puncak gunung sampai laut, memiliki sumberdaya alam cukup besar berupa lingkungan darat, laut dan pulau-pulau kecil. Luas total wilayah Provinsi Banten 16.331,20 km<sup>2</sup> yang terdiri atas:

- wilayah darat (4 kabupaten dan 2 kota) seluas 8.651,20 km<sup>2</sup>
- wilayah laut sejauh 12 mil, seluas ± 7.680 km<sup>2</sup> yang diukur dari garis pantai tegak lurus ke arah laut lepas
- perairan kepulauan (dengan asumsi panjang pantai Provinsi Banten 400 km dan 1 mil laut = 1,6 km) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
  1. sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa
  2. sebelah Timur dibatasi oleh Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Provinsi Banten
  3. sebelah Selatan dibatasi oleh Samudera Hindia
  4. sebelah Barat dibatasi oleh Selat Sunda.

Dengan luas wilayahnya yang cukup besar terdiri dari wilayah darat dan laut serta jumlah penduduk sebanyak 9.308.944 jiwa (BPS Banten, Tahun 2005) membentuk suatu ekosistem kehidupan yang dinamis antara manusia dan lingkungan hidupnya. Keanekaragaman bentang alam dan luasnya wilayah ini memberi potensi kekayaan sumberdaya alam yang cukup besar bagi Provinsi Banten berupa lahan, sumberdaya air, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir/laut, bahan galian/tambang dan wisata. Selain kekayaan alam, pertumbuhan industri berperan dalam meningkatkan jumlah penduduk Banten dan membentuk potensi sumberdaya manusia.

Degradasi sumberdaya alam khususnya air dan lahan, yang ditandai dengan deplesi sumber air (permukaan dan air bawah tanah, baik kuantitas maupun kualitasnya), semakin meluasnya tanah kritis dan DAS kritis, penurunan produktifitas lahan, semakin meluasnya kerusakan hutan (terutama karena perambahan) baik hutan pegunungan maupun hutan pantai (mangrove).

Permasalahan pencemaran, baik pencemaran air, udara maupun tanah yang penyebarannya sudah cukup meluas dan terkait dengan industri, rumah tangga dengan segala jenis limbahnya, terutama sampah.

Permasalahan kebencanaan alam, yaitu Provinsi Banten terutama bagian tengah dan selatan termasuk wilayah rawan gempa dan volkanisme. Wilayah ini termasuk daerah yang paling sering tertimpa musibah tanah longsor dibanding wilayah lainnya di Indonesia, yang terkait dengan "irrational land use" dan juga kegiatan pertambangan.

Inkonsistensi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dengan eksisting penggunaan lahan/pemanfaatan ruang yang tidak berwawasan lingkungan.

Permasalahan kawasan pesisir dan pantai, yaitu kerusakan hutan mangrove, abrasi dan akresi pantai, perubahan tataguna lahan di wilayah pesisir, intrusi air laut, dan pencemaran air laut.

Permasalahan sosial kependudukan, ditandai dengan tingginya urbanisasi, munculnya permukiman kumuh pada hampir seluruh kota di Provinsi Banten, pedagang kaki lima – PKL dan kesemrawutan lalu lintas.

Terbatasnya sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (termasuk laboratorium lingkungan) serta sistem informasi lingkungan. Lemahnya fungsi pengendalian, sebagai akibat kurang efektifnya kegiatan pemantauan, dan juga akibat rendahnya

penegakan hukum (law enforcement), dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

### **I.1.1. Visi dan Misi Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Sebagaimana yang tercantum dalam Perda Provinsi Banten No.2/2002 Tentang Rencana Strategis Provinsi Banten Tahun 2002-2006, disebutkan bahwa Misi Provinsi Banten yang berhubungan dengan bidang Lingkungan Hidup adalah: *“Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan merata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan”*.

Sejalan dengan misi Provinsi Banten, maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Provinsi Banten yang bertanggungjawab dalam mengkordinasikan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan di Propinsi Banten, merumuskan suatu visi, yaitu **” Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan Menuju Banten Ramah Lingkungan ”**. Makna dari visi tersebut secara eksplisist mengandung arti adanya suatu harapan terciptanya kondisi lingkungan hidup yang semakin baik yang ditandai dengan adanya komitmen yang tinggi dan tingkat kepedulian dari para pihak di Provinsi Banten, baik dari aparatur, dunia usaha, maupun masyarakat sendiri.

Misi tersebut merupakan pengejawantahan dari Misi Nomor 7 yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Provinsi Banten yang berbunyi: **Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang berkeadilan dan merata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan**. Penjelasan makna dari pernyataan visi tersebut dimaksudkan agar dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Banten ini harus disesuaikan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan, agar tetap terjaga keseimbangan lingkungan hidup. Implementasi pembangunan berkelanjutan mempunyai spektrum yang luas dan mengandung pengertian yang komprehensif, dimana dituntut keterpaduan perencanaan program dan

pelaksanaan kegiatan serta keterlibatan seluruh stakeholders termasuk masyarakat. Penyebarluasan informasi yang berkenaan dengan lingkungan hidup merupakan bentuk implementasi pembangunan berkelanjutan.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka akan ditempuh melalui perwujudan Misi Bapedal yang meliputi 4 (empat) hal yaitu :

- 1) Meningkatkan pentaatan terhadap hukum dan peraturan bidang lingkungan.
- 2) Meningkatkan kapasitas lembaga, SDM, dan instrumen pendukung pengendalian lingkungan.
- 3) Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- 4) Meningkatkan pelayanan informasi lingkungan hidup bagi kepentingan masyarakat, aparatur, dan dunia usaha.

### **I.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan**

Penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Provinsi Banten bertujuan :

1. Menyediakan data, informasi dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah;
2. menyediakan sumber informasi utama Repetada, Propeda dan kepentingan Investor;
3. Sebagai salah satu sumber informasi dalam penyusunan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI);
4. Sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk akuntabilitas publik yaitu sebagai laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup kepada para stakeholder;
5. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik;
6. Menyediakan sumber informasi utama bagi rencana dan program pembangunan tahunan daerah serta untuk kepentingan penanaman modal (investor), peningkatan peran publik dalam pembangunan berkelanjutan.

### I.1.3. Sejarah Penyusunan Laporan

Penulisan laporan keadaan lingkungan di Provinsi Banten dalam bentuk Status Lingkungan Hidup Daerah merupakan pengalaman pertama kali, dimana dalam proses penyusunannya dilakukan secara rinci melalui beberapa tahapan dan melibatkan narasumber serta pakar baik dari pusat maupun daerah, dengan harapan dapat menghasilkan laporan yang mempunyai tingkat validitas tinggi. Namun demikian penulisan laporan keadaan lingkungan dalam bentuk lain telah beberapa kali dilakukan oleh BAPEDAL Provinsi Banten selama kurun waktu tahun 2001 sampai dengan 2005, yaitu :

No	Tahun	Jenis Laporan	Keterangan
1.	2001	NKLD (Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah)	Disusun laporan keadaan lingkungan hidup daerah dalam 4 jilid sesuai petunjuk yang berlaku
2.	2003	NKLD (Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah)	Disusun dalam 3 jilid sesuai petunjuk terbaru
3.	2004	ASER (Annual Statement of the Environmental Report)	Laporan Keadaan lingkungan ditulis dengan ringkas, jelas, komunikatif untuk memberikan data dan informasi lingkungan kepada masyarakat. Format laporan ini disusun sehubungan dengan Proyek WJEMP (Western Java Environmental Management Project)
4.	2005	ASER (Annual Statement of the Environmental Report)	Format dan tujuan penyusunan sampai dengan tahun 2004, namun materi laporan tentu sesuai kondisi lingkungan terbaru

Didalam penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten diperlukan data utama baik data primer maupun sekunder khususnya data lingkungan hidup dalam satu tahun berjalan, dengan dukungan oleh data lain yang memperkuat termasuk data demografi. Oleh karena itu untuk mendukung

penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten, disusun pula Basis Data Provinsi Banten yang meliputi data-data **Sumberdaya Alam (SDA)**, **Sumberdaya Buatan (SDB)** dan **Sumberdaya Manusia (SDM)**. Data-data tersebut diperoleh dari dinas/instansi terkait yang dikumpulkan secara terkoordinasi, dengan klasifikasi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi parameter basis data : sumberdaya lahan; sumberdaya hutan; sumberdaya air; pesisir dan lautan; iklim, atmosfer, udara; keanekaragaman hayati; energi dan sumberdaya mineral; bencana; pertanian; pariwisata; transportasi; perindustrian; perekonomian dan investasi; perikanan; peternakan; habitat; limbah padat dan cair; bahan B3 dan limbah B3; kependudukan; pendidikan; kemiskinan; kesehatan; ketenagakerjaan serta kelembagaan.

## **I.2. Sistematika Pelaporan**

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten disusun berdasarkan metode P-S-R yaitu metode penulisan yang dikembangkan oleh UNEP-United Nations Environment Programme dari OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), direkomendasikan dan diadopsi oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup Provinsi Banten sebagai sumber referensi dalam laporan Status Lingkungan Hidup baik di Pusat maupun di daerah.

Metode P-S-R tersebut pada dasarnya merupakan metode aliran data dan informasi yang menggambarkan kondisi dan kualitas lingkungan hidup yang menjadi isu masalah, tekanan atau penyebab terjadinya masalah lingkungan, dampak kerusakan dan atau pencemaran lingkungan, upaya apa yang dilakukan dalam rangka menanggulangi isu dan permasalahan lingkungan.

### **I.2.1. Format Penulisan Laporan**

Penulisan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah di Provinsi Banten terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu sebagai berikut :

## **Bab I**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan gambaran umum tentang latar belakang, perlunya disusunnya status lingkungan hidup daerah di Provinsi Banten, visi dan misi pengelolaan lingkungan di Provinsi Banten, tujuan penyusunan laporan, sejarah penyusunan laporan serta sistematika pelaporan yang mencakup format penulisan laporan dan proses penyusunan laporan. Pada bab ini sekilas diuraikan ringkasan laporan yang memuat ringkasan isu lingkungan hidup yang terjadi selama tahun 2006 di Provinsi Banten.

## **Bab II**

Bab ini menguraikan gambaran umum daerah tentang kondisi geografis, geologis dan demografis, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat di Provinsi Banten, yaitu terdiri dari aspek **Sumberdaya Alam** (air, lahan dan hutan, keanekaragaman hayati, pesisir dan laut, udara, atmosfer dan iklim, energi dan sumber daya mineral SDA ), aspek **Sumberdaya Buatan** (pertanian dan perkebunan, transportasi, perindustrian, perekonomian dan kemiskinan, limbah padat dan cair, B3 dan limbah B3, perikanan, peternakan dan bencana) dan **Sumberdaya Manusia** (kependudukan dan pemukiman, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan, kelembagaan dan organisasi masyarakat) serta gambaran tentang keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Banten. Pada bab ini diuraikan gambaran singkat tentang kebijakan pengelolaan lingkungan hidup baik dari segi kebijakan pembangunan daerah dan pendanaan lingkungan di Provinsi Banten.

## **Bab III**

Bab ini menguraikan hasil monitoring, evaluasi dan analisis kebijakan isu lingkungan hidup daerah yang menggambarkan lingkungan hidup di Provinsi Banten dalam alur rangkaian informasi yang utuh yang meliputi :

- Penyebab atau tekanan (pressure) terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup beserta analisisnya;
- Kondisi atau status (state) lingkungan hidup serta isu lingkungan hidup yang bertentangan dengan prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan;

- Dampaknya (impact) yang terjadi akibat adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup;
- Langkah-langkah penanggulangan (response) yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten meupaun segenap lapisan masyarakat.

#### **Bab IV**

Bab ini merupakan rekomendasi untuk rencana tindak lanjut menangani masalah lingkungan di daerah dan secara umum digunakan sebagai bahan masukan bagi perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengendalian pencemaran dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Banten.

#### **I.2.2. Proses Penyusunan Laporan**

Proses penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah di Provinsi Banten disusun melalui beberapa tahapan yaitu :

##### **1. Pembentukan Tim Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah dan Basis Data serta Kesekretariatan**

Tim Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah dan Basis Data serta Kesekretariatan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BAPEDAL Provinsi Banten Nomor : 902/Kep.18-Bpdl/V/2006 tanggal 1 Mei 2006, dimana susunan keanggotaannya berasal dari unsur BAPEDAL Provinsi Banten, Instansi terkait dilingkungan Provinsi Banten dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, yang bertujuan agar lebih memudahkan dalam hal pengumpulan data serta keakuratan data yang diperoleh untuk penyusunan Basis Data.

##### **2. Pengumpulan Data**

Data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dari anggota tim penyusun dihimpun oleh Sekretariat yang nantinya akan disusun menjadi Basis Data Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten yang digunakan untuk

mendukung penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten.

### **3. Konsinyaring**

Konsinyaring bertujuan untuk mengkonfirmasi data, merelease data dan menganalisa data agar data yang dihimpun dalam Basis Data menjadi akurat dan dapat dituangkan dalam laporan Status Lingkungan Hidup Daerah. Pelaksanaan Konsinyaring dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

#### **Konsinyaring I**

Konsinyaring I dilaksanakan pada tanggal 26 September 2006, dengan agenda kerja meliputi :

1. Arahan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengenai Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah dan Basis Data
2. Penjelasan dari Narasumber/Pakar yang terdiri dari
  - Pakar Sumberdaya Alam (SDA)
  - Pakar Sumberdaya Buatan/Teknologi (SDB)
  - Pakar Sumberdaya Manusia (SDM)
  - Pakar Statistik

Peserta terdiri dari :

1. Pakar SLHD dan Basis Data dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup
2. Pakar Statistik dari BPS Provinsi Banten
3. Pakar (SDA, SDM, SDB)
4. Tim Penyusun SLHD dan Basis Data

#### **Out Put :**

- Adanya pemahaman dan persepsi yang sama dari anggota Tim penyusun mengenai penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah dan Basis Data

### **Konsinyaring 2**

Konsinyaring 2 dilaksanakan pada tanggal ..... November 2006, dengan agenda kerja meliputi :

1. Pembahasan Bab 1 SLHD
2. Pembahasan Bab 2 SLHD
3. Perumusan Kesepakatan Bab 1 dan Bab 2 (Draft Bab 1 dan Bab 2 SLHD)
4. Sinkronisasi data/kesepakatan isi basis data berdasarkan Sumberdaya Alam (SDA), Sumberdaya Buatan/Teknologi (SDB) dan Sumberdaya Manusia (SDM)
5. Kesepakatan out line SLHD
6. Penugasan Bab 3 dan Bab 4 SLHD

Peserta terdiri dari :

1. Pakar SLHD dan Basis Data dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup
2. Pakar Statistik dari BPS Provinsi Banten
3. Pakar (SDA, SDM, SDB)
4. Tim Penyusun SLHD dan Basis Data

### **Out Put :**

1. Draft Bab 1 dan Bab 2 SLHD
2. Adanya kesepakatan mengenai Basis Data
3. Adanya kesepakatan out line Status Lingkungan Hidup Daerah

### **Konsinyaring 3**

Konsinyaring 3 dilaksanakan pada tanggal ..... November 2006, dengan agenda kerja meliputi :

1. Pembahasan Bab 3 SLHD
2. Pembahasan Bab 4 SLHD
3. Perumusan Kesepakatan Bab 3 dan Bab 4 (Draft Bab 3 dan Bab 4 SLHD)
4. Review Draf SLHD dan Basis Data
5. Persiapan Lokakarya

Peserta terdiri dari :

1. Pakar SLHD dan Basis Data dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup
2. Pakar Statistik dari BPS Provinsi Banten
3. Pakar (SDA, SDM, SDB)
4. Tim Penyusun SLHD dan Basis Data

**Out Put :**

1. Draft SLHD
2. Draft Basis Data

**4. Lokakarya**

Lokakarya dilaksanakan pada tanggal ..... November 2006, dengan agenda kerja pembahasan Draft SLHD dan Basis Data Provinsi Banten Tahun 2006

Peserta terdiri dari :

1. Pakar SLHD dan Basis Data dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup
2. Pakar Statistik dari BPS Provinsi Banten
3. Pakar (SDA, SDM, SDB)
4. Tim Penyusun SLHD dan Basis Data
5. Aparatur Pemerintah
6. Unsur Perguruan Tinggi
7. Tokoh Masyarakat, LSM dan Dunia Usaha

**Out Put :**

Laporan SLHD dan Basis Data sebagai informasi lingkungan hidup yang layak menjadi bagian dari sistem pelaporan publik dan sebagai bentuk akuntabilitas publik, bahan untuk dokumen perencanaan serta bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.

### **I.2.3. Ringkasan Laporan**

Gambaran isu-isu yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di Provinsi Banten selama tahun 2006 secara umum adalah :

#### **1) Air**

Penyebaran sumberdaya air di Provinsi Banten secara alamiah tidak merata, ada daerah yang memiliki potensi sumber air cukup tinggi tetapi ada juga daerah yang minim sumber air. Potensi sumberdaya air di wilayah Provinsi Banten digambarkan melalui kondisi sumber air permukaan dan air tanah. Kuantitas air sungai relatif cukup tinggi meskipun terjadi fluktuasi debit aliran yang cukup besar antara musim hujan dan musim kemarau, sedangkan kualitasnya menunjukkan adanya indikasi pencemaran di beberapa sungai. Kebutuhan air akan meningkat seiring pertumbuhan kegiatan dan jumlah penduduk Provinsi Banten. Kebutuhan ini harus tetap bisa dipenuhi dari sumber-sumber air yang ada, sehingga diperlukan tindakan pelestarian sumberdaya air, baik air permukaan maupun air tanah.

Mengantisipasi kebutuhan air yang terus meningkat, perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi seluruh sumberdaya air yang ada, termasuk kemungkinan pemanfaatan teknologi di bidang pemurnian air (daur ulang, desalinasi air laut)

Perkembangan kegiatan industri meningkatkan tekanan terhadap sumberdaya air dalam hal penurunan kualitas air (terjadi pencemaran air), demikian juga buangan limbah domestik (rumah tangga) ikut memberi andil terhadap penurunan kualitas air.

Indikator terjadinya pencemaran air mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Adapun isu utama lingkungan hidup yang berkaitan dengan sumberdaya air yang terjadi di Provinsi Banten selama kurun waktu tahun 2006 adalah sebagai berikut :

## **2) Udara dan Atmosfer**

Pencemaran udara dapat terjadi yang disebabkan oleh adanya kontaminan (pencemar) di udara yang mengakibatkan kandungan senyawaan gas menjadi berubah. Perubahan ini dapat memberikan dampak negatif bagi kelangsungan hidup makhluk hidup karena menimbulkan reaksi kimia secara spontan di udara. Berdasarkan bentuk fisiknya, pencemar udara dibedakan menjadi dua yaitu yang berbentuk partikulat dan berbentuk gas.

Indikator terjadinya pencemaran udara mengacu pada 2 peraturan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan SK Menaker No. 51/Menaker/1999 tentang nilai ambang batas (NAB).

Pencemaran udara di Provinsi Banten terutama di daerah perkotaan dari waktu ke waktu diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor seperti sektor industri, perhubungan/transportasi dan pariwisata. Hal ini perlu mendapatkan perhatian secara serius dan perlu penanganan atau pengendalian secara baik dan komprehensif antara instansi terkait.

Adapun isu utama lingkungan hidup yang berkaitan dengan udara yang terjadi di Provinsi Banten selama kurun waktu tahun 2006 adalah sebagai berikut :

### **3) Lahan dan Hutan**

Peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Banten berdampak pada peningkatan kebutuhan ekonomi. Masyarakat pedesaan yang terbatas sumberdaya ekonominya mencari alternatif sumberdaya ekonomi dengan mengeksploitasi sumberdaya alam yang terdekat dan termudah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut. Komponen lingkungan atau sumberdaya alam yang paling mudah dieksploitasi oleh masyarakat desa ialah lahan pekarangan miliknya atau yang ada di sekitar mereka. Yang sering dijumpai ialah kegiatan penambangan liar berupa penggalian pasir baik di bukit maupun di sungai. Selain penambangan pasir juga ada penambangan emas dan batubara serta penebangan hutan secara liar yang tidak mengindahkan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Potensi hutan di Provinsi Banten menurut data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten (2001) dan PT. Perhutani III Jawa Barat (2003) adalah seluas 237.197,29 Ha, terdiri dari hutan produksi (106.424,34 Ha), hutan lindung (33.362,8 Ha), hutan konservasi (97.360,15 Ha), dan hutan wisata (50 Ha). Sedangkan areal yang termasuk perkebunan adalah seluas 176.733,03 Ha.

Indikator terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan lahan dan hutan mengacu pada PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

Adapun isu utama lingkungan hidup yang berkaitan dengan sumberdaya lahan dan hutan yang terjadi di Provinsi Banten selama kurun waktu tahun 2006 adalah sebagai berikut :

#### **4) Keanekaragaman Hayati**

Keanekaragaman hayati merupakan sumberdaya penting bagi kehidupan sosial-ekonomi dan kebudayaan masyarakat. Bagi provinsi, keanekaragaman hayati dapat menjadi sumberdaya yang mempunyai arti ekonomi penting. Banyak jenis tumbuhan yang terdapat di hutan seperti rotan, bambu, tumbuhan-tumbuhan obat, dan lain-lain yang dapat dijadikan pemasukan bagi provinsi. Mengingat pentingnya sumberdaya hayati ini, maka konservasi kawasan hutan termasuk flora dan fauna serta keunikan alam perlu ditingkatkan untuk melindungi keanekaragaman plasma nutfah, jenis spesies, dan ekosistem. Degradasi luas hutan memacu hilangnya atau punahnya sumberdaya hayati tersebut. Berdasarkan hasil citra landsat DEPHUT 2002 dan land use Repprot 1986 terjadi degradasi luas kawasan hutan sebesar 45,39% atau 474.400 Ha yang berubah fungsi menjadi savana, semak belukar, pertanian, tambak, pertambangan, dan lain-lain.

Konservasi keanekaragaman hayati yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk beberapa bentuk kawasan konservasi diantaranya taman nasional, suaka alam, suaka alam laut, suaka margasatwa, cagar alam, dan hutan lindung.

Indikator terjadinya kerusakan keanekaragaman hayati yang menyebabkan penurunan keanekaragamannya mengacu pada Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Keanekaragaman Hayati.

Adapun isu utama lingkungan hidup yang berkaitan dengan sumberdaya keanekaragaman hayati yang terjadi di Provinsi Banten selama kurun waktu tahun 2006 adalah sebagai berikut :

## 5) Pesisir dan Laut

Jika dilihat dari asal kejadiannya, jenis kerusakan lingkungan di pesisir, pantai dan laut bisa berasal dari luar sistem wilayah pesisir, pantai dan laut maupun yang berlangsung di dalam wilayah pesisir, pantai dan laut itu sendiri. Pencemaran yang terjadi di wilayah daratan akan terbawa oleh aliran sungai masuk ke muara dan akhirnya tersebar ke seluruh pantai dan pesisir di sekitarnya. Pencemaran dapat berasal dari limbah yang dibuang oleh berbagai kegiatan (seperti tambak, perhotelan, pemukiman, industri, dan transportasi laut) yang terdapat di dalam wilayah pesisir; dan juga berupa kiriman dari berbagai dampak kegiatan pembangunan di bagian hulu.

Sedimentasi atau pelumpuran yang terjadi di perairan pesisir sebagian besar berasal dari bahan sedimen di bagian hulu (akibat penebangan hutan dan praktek pertanian yang tidak mengindahkan asas konservasi lahan dan lingkungan), yang terangkut aliran air sungai atau air limpasan dan diendapkan di perairan pesisir. Kegiatan pengolahan pertanian dan kehutanan (*up land*) yang buruk tidak saja merusak ekosistem sungai (melalui banjir dan erosi), tetapi juga akan menimbulkan dampak negatif pada perairan pesisir dan pantai. Sementara itu, kerusakan lingkungan yang berasal dari wilayah pesisir, pantai dan laut bisa berupa degradasi fisik habitat pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun); abrasi pantai; hilangnya daerah konservasi/kawasan lindung; eksploitasi sumberdaya alam yang berlebih (*over exploitation*); dan bencana alam.

Indikator terjadinya pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut mengacu pada PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut.

Adapun isu utama lingkungan hidup yang berkaitan dengan sumberdaya pesisir dan laut yang terjadi di Provinsi Banten selama kurun waktu tahun 2006 adalah sebagai berikut :